

## MODEL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TERHADAP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA CARAWALI

<sup>1)</sup>Hasmawati, <sup>2)</sup>Hariyanti Hamid, <sup>3)</sup>Kamaruddin Sellang

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang

[hasmawati43172026@gmail.com](mailto:hasmawati43172026@gmail.com)

[tantistisip@yahoo.co.id](mailto:tantistisip@yahoo.co.id)

[kamaruddinsellang@yahoo.co.id](mailto:kamaruddinsellang@yahoo.co.id)

### Abstrak

Tujuan penelitian untuk mengetahui Model Pemberdayaan Masyarakat terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan di Desa Carawali, untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan di Desa Carawali. Populasi penelitian ini adalah 644 KK, sedangkan sampel penelitian adalah 87 KK. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah, observasi, angket dan studi kepustakaan, sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data skala likert. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan tabel frekuensi dan menggunakan aplikasi SPSS. Hasil penelitian model pemberdayaan masyarakat untuk perencanaan pembangunan di Desa Carawali Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang dengan nilai persentase rata-rata 74,75% dalam kategori baik. faktor pendukung pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Desa Carawali Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang. dengan persentase 57% sedangkan faktor penghambat pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Desa Carawali Kecamatan Watang Pulu dengan persentase 49,4%.

Kata Kunci: Pemberdayaan masyarakat, perencanaan pembangunan

### Abstract

*The purpose of the study was to determine the community empowerment model for the implementation of development planning in carawali village, to find out what factors were supporting and inhibiting community empowerment in the implementation of development planning in carawali villagr. The population of this study was 644 families, while the research sample was 87 families. Data collection techniques used in the study were observation, questionnaires and literature study, while the data analysis technique used was likert-scale data analysis. The collected data is then analyzed using a frequency table and using the SPSS application. The result of the research on community empowerment models for development planning in Carawali village, Wattang Pulu district, Sidenreng Rappang regency with an average value of 74,75% in the good category. The supporting factors for community empowerment on development planning in Carawali Village, Watang Pulu dictrict sidenreng rappang regency with a percentage of 57% while the inhibiting factors for community empowerment on development planning in Carawali Village, Wattang pulu district with a percentage of 49,4.*

*Keywords: Community empowerment, development planning.*

## A. PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan suatu masyarakat yang memiliki perwujudan dalam desa terencana, pemerintah Desa dan semua komponen masyarakat harus dikaitkan dengan langkah pengaturan kemajuan. Kemajuan adalah perubahan berharga menuju kerangka sosial dan keuangan yang dicirikan sebagai keinginan suatu negara. Seperti yang ditunjukkan oleh Rogers (Rochajat, 2011:3). Dari pandangan para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa pembangunan adalah penyesuaian untuk mendorong ekonomi dan memperluas kemajuan Desa.

Berdasarkan Amanat UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa secara tegas menyatakan bahwa pembangunan desa dilaksanakan dalam upaya percepatan dan peningkatan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa di perdesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif (Pasal 83 ayat 2). Ahfan dkk., (2015). Amanat ini semakin jelas dengan disahkannya Undang-undang Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa, yang pelaksanaan fungsinya mengacu pada Permendagri Nomor 51 Tahun 2007 tentang Pusat Kegiatan Belajar. Masyarakat telah dilaksanakan di 49 kabupaten (Dirjen PMD-PSP3 IPB, 2013).

Mengingat UU No. 25 Tahun 2004 tentang Kerangka Kerja Penataan Ruang Dalam Bagian II pasal 2 menjelaskan alasan SPPN adalah untuk menjamin terbentuknya keterpaduan, sinkronisasi, dan kerjasama energi antar daerah, antar ruang, lintas waktu, antar kerja pemerintahan serta antar tengah. dan daerah. Selanjutnya ditegaskan dalam pasal 5 yang menyatakan bahwa rencana perbaikan jangka menengah daerah (RPJMD) harus fokus pada rencana kemajuan jangka panjang daerah (RPJP) dan rencana perbaikan jangka menengah publik (RPJMN).

Peraturan Daerah Sidenreng Rappang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pembinaan Desa pada pasal 8 menjelaskan bahwa dalam penyusunan RPJM Desa, Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa secara partisipatif yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa. , komponen wilayah lokal Desa dan perusahaan di Desa. Pelaksanaan Town Improvement Arranging dilakukan melalui penguatan, partisipatif, berpihak pada daerah, terbuka, bertanggung jawab, spesifik, produktif, hati-hati, terpelihara

dan melalui siklus berulang untuk mendapatkan hasil yang menarik.

Kemajuan pembangunan yang partisipatif memerlukan pertimbangan semua pihak dalam mengefektifkan tugas jaringan pedesaan sebagai penggerak pergantian peristiwa lokal dan publik. Tugas daerah sangat vital dalam memberdayakan dan menghidupkan kembali penyelenggaraan pemungutan suara melalui upaya masyarakat lintas daerah dan mitra untuk mencegah dan menyelesaikan masalah-masalah yang dapat menimbulkan bencana moneter, sosial dan lingkungan di kemudian hari.

Berdasarkan hal tersebut, penulis menemukan gejala yang terjadi di lapangan diantaranya banyak program pembangunan yang dilaksanakan pemerintah tidak melibatkan masyarakat secara optimal dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan di desa, sehingga menimbulkan kesenjangan persepsi antara masyarakat dan pemerintah. Hal ini mengakibatkan rendahnya kesadaran masyarakat. pada akhirnya mengakibatkan rendahnya tingkat keberdayaan masyarakat. Hal ini dapat dibuktikan dengan rendahnya tingkat partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan.

Prof. Dr. Moh. Budiarta, (2001) berpendapat bahwa program pemberdayaan masyarakat, sosialisasi sangat penting. Sosialisasi terbaik dilakukan oleh aparat pemerintah jika dibantu oleh para tokoh masyarakat setempat. Itu pun dengan kondisi tertentu, apalagi jika aparat pemerintah dan perintis daerah benar-benar menjadi contoh daerah yang baik. Meski demikian, hingga saat ini, tidak sedikit orang yang pada umumnya meragukan otoritas pemerintah daerah (Galela et al., nd). Sementara itu, menurut Widjaja (2003:169) Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya membangun kapasitas dan kapabilitas daerah, sehingga individu dapat memahami kepribadian, harga diri, dan harga dirinya. ketenangan dan nilai yang paling tinggi untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri di bidang keuangan, sosial, agama dan sosial.(Mustanir et al., 2019).

Kemudian dari penjabaran masalah diatas maka calon peneliti berasumsi bahwa pemberdayaan masyarakat di desa carawali masih kurang sehingga banyak perencanaan pembangunan belum terlaksana. untuk melihat pemberdayaan masyarakat dapat

ditinjau teori dari Soeharto, 2008 yaitu: tingkat kesadaran dan keinginan untuk berubah (*Power to*), tingkat kemampuan meningkatkan kapasitas untuk memperoleh akses (*Power Within*), tingkat kemampuan menghadapi rintangan (*Power over*) dan tingkat kerjasama dan solidaritas (*Power with*).

Berdasarkan kondisi di atas, calon peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Model pemberdayaan masyarakat terhadap perencanaan pembangunan di Desa Carawali Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang dengan tujuan untuk mengetahui pemberdayaan Masyarakat dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan di Desa Carawali dan untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penunjang dan penghambat pemberdayaan masyarakat.

Menurut Ife (2002), program Pemberdayaan daerah hanya dapat dianggap sebagai petunjuk Pemberdayaan jika dilakukan berdasarkan standar Pemberdayaan, seperti standar kualitas yang komprehensif, pengelolaan, keragaman, pergantian peristiwa alami, pergantian peristiwa yang disesuaikan, dan menaklukkan konstruksi yang tidak ramah. Standar-standar ini, bila diterapkan dengan andal, akan menjadikan program Pemberdayaan sebagai Pemberdayaan wilayah lokal yang diperlengkapi untuk memberdayakan wilayah lokal. Kajian konseptual tentang pemberdayaan menghadirkan banyak indikator pemberdayaan. Empat di antaranya menyangkut derajat keberdayaan (Soeharto, 2008), yaitu Tingkat kesadaran dan keinginan untuk berubah (*power to*), Tingkat kemampuan meningkatkan kapasitas untuk memperoleh akses (*power within*), Tingkat kemampuan menghadapi hambatan (*power over*), dan Tingkat kemampuan kerjasama dan solidaritas (*power with*).

Teori perkembangan Walt W. Rostow dari buku *Theory of Development* (2019) karya Kumba Digdowiseiso, lima fase perbaikan. Rostow berpendapat bahwa siklus perbaikan dalam masyarakat umum mengisi secara teratur, khususnya dari masyarakat regresif ke masyarakat yang lebih maju. Proses pertumbuhan ini melewati fase yang cukup panjang. Fase kemajuan Rostow adalah

1. Masyarakat tradisional.
2. Tahap persyaratan tinggal landas
3. Tahap tinggal landas
4. Tahap menuju kedewasaan

## 5. Tahap konsumsi tinggi

### B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, yaitu sistem berpikir kritis dengan menggambarkan objek penelitian yang berkembang tergantung pada realitas saat ini sebagaimana adanya, kemudian dibedah dan diuraikan sebagai tinjauan dan pemikiran perbaikan. Jumlah penduduk di kelompok masyarakat Desa Carawali adalah 644 kepala keluarga dan Sampel 87 orang menggunakan pemeriksaan non-kemungkinan. Strategi pengumpulan informasi yang digunakan adalah persepsi, polling, dan menulis konsentrat dengan metode penelusuran informasi menggunakan tabel rekurensi dan SPSS 21 for windows..

### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil observasi, kuesioner dan studi pustaka yang dibagikan kepada responden, dapat diperoleh informasi mengenai model pemberdayaan masyarakat untuk perencanaan pembangunan di Desa Carawali Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang. Dari penelitian ini diperoleh informasi yang dapat dijadikan bahan penelitian dan kesimpulan. Pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Desa Carawali, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang dapat digambarkan sebagai berikut:

Hasil yang telah diuraikan sebelumnya untuk mengetahui pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan pembangunan, berikut adalah pembahasan indikator penelitian untuk menjawab rumusan masalah yang diangkat peneliti, yaitu Model pemberdayaan masyarakat terhadap perencanaan pembangunan. Berdasarkan hasil data rekapitulasi kuisisioner penelitian yang dilakukan di Desa Carawali Kecamatan watang pulu mengenai model pemberdayaan masyarakat diperoleh persentase sebesar 74,75 % termasuk dalam kriteria Baik, hal ini menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat seharusnya mencapai 100% namun terdapat 25,25% persentase yang tidak tercapai. Menurut Widjaja (2003:169) pemberdayaan masyarakat adalah upaya peningkatan kemampuan dan potensi masyarakat, agar masyarakat dapat mewujudkan jati diri, harkat dan martabatnya secara maksimal agar dapat bertahan dan

mengembangkan diri secara mandiri dalam perekonomian, bidang sosial, agama dan budaya (Mustanir et al., 2019).

Hasil penelitian pemberdayaan masyarakat bahwa yang paling tinggi persentasenya adalah Tingkat kemampuan meningkatkan kapasitas untuk memperoleh akses dengan persentase 80% sedangkan responden terendah adalah tingkat kesadaran dan keinginan untuk berubah 66% . dengan melihat hasil persentase terendah dari penjabaran tersebut dapat dikatakan bahwa indikator tingkat kesadaran dan keinginan untuk berubah memiliki persentase terendah dibandingkan dengan indikator lainnya yang merupakan penghambat pemberdayaan masyarakat sehingga tidak mencapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa kurangnya Kesadaran masyarakat ikut terlibat dalam proses perencanaan pembangunan di Desa Carawali.

Sedangkan pada perencanaan pembangunan diperoleh rata-rata persentase yaitu 64,8% dengan kategori baik. Hal ini berarti indikator perencanaan pembangunan yang seharusnya mencapai 100% namun masih ada 35,8% persentase yang tidak mencapai. Maisah (2010:7) mengungkapkan bahwa teori perencanaan ideal adalah yang mampu mengakomodir kepentingan dan kebutuhan masyarakat serta mampu mengintegrasikan berbagai kepentingan yang ada.

Rujukan dalam penelitian perencanaan pembangunan mengulas tahapan-tahapan perkembangan menurut Walt W. Rostow dari buku teori perkembangan (2019) karya Kumba Digdowiseiso yaitu masyarakat tradisional, tahapan pra-syarat lepas landas, tahapan lepas landas, tahapan kedewasaan dan tahapan untuk konsumsi tinggi.

Faktor – faktor yang mempengaruhi pemberdayaan masyarakat terhadap perencanaan pembangunan di Desa Carawali kecamatan watang pulu, Hasil rekapitulasi data kuisisioner pada penelitian yang dilakukan di Desa carawali kecamatan watang pulu kabupaten sidenreng rapping untuk faktor pendukung diperoleh persentase 57%. Menurut Hamzah B. Uno (2007), faktor motivasi sebagai dorongan internal dan eksternal dalam diri seseorang ditunjukkan dengan adanya keinginan dan minat, dorongan dan kebutuhan, harapan dan aspirasi, harapan dan penghargaan dengan persentase 47,3% dan kebijakan pemerintah.

faktor dengan persentase 9,7%. Sedangkan faktor penghambat dengan persentase 49,4% menurut Munandar (2011) anggaran adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan yang dinyatakan dalam satuan moneter atau satuan yang berlaku untuk jangka waktu tertentu dengan persentase 19,3%. , faktor penghambat sarana dan prasarana menurut persentase 30,1%.

#### D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, penulis merumuskan kesimpulan dengan uraian sebagai berikut:

1. Model pemberdayaan masyarakat terhadap perencanaan pembangunan di Desa Carawali Kecamatan Watang Pulu dalam kategori rata – rata 74,75%. Berdasarkan pendapat teori Soeharto (2008) dengan rekapitulasi kuisisioner indikator model pemberdayaan masyarakat diperoleh 74,75% dengan kategori baik, hal ini berarti indikator model pemberdayaan masyarakat seharusnya mencapai 100% namun terdapat 25,25% persentase yang tidak tercapai. Indikator yang paling tinggi persentasenya adalah Tingkat kemampuan meningkatkan kapasitas untuk memperoleh akses dengan persentase 80% sedangkan responden terendah adalah tingkat kesadaran dan keinginan untuk berubah 66%. Oleh karena itu perlu ditingkatkan.
2. Faktor – faktor yang mempengaruhi pemberdayaan masyarakat diperoleh faktor pendukung dengan persentase 57%. Menurut Hamzah B. Uno (2007), faktor motivasional adalah dorongan internal dan eksternal dalam diri seseorang yang ditunjukkan dengan adanya keinginan dan minat, dorongan dan kebutuhan, harapan dan cita-cita.Sedangkan faktor penghambat dengan persentase yaitu 49,4% menurut Munandar (2011) anggaran adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan yang dinyatakan dalam satuan atau satuan moneter yang berlaku untuk jangka waktu tertentu.

#### E. REFERENSI

- Ahfan, R. A. (2015). Pemberdayaan Masyarakat pada Program PNPM MP, Desa Peradaban, CSR dan Posdaya

(Konteks Lahirnya UU No. 6 Tahun 2014). *Jurnal Bina Praja*, 89–99.

- Ahmad, J. (2015). *Metode Penelitian Administrasi Publik (Teori Dan Aplikasi)*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Angraini, R. (2016). Analisis Pelaksanaan Program Kerja Baznas Kabupaten Padang Pariaman Dalam Mensejahterakan Mustahik (Studi Kasus Kecamatan Lubuk Alung). In Analisis Pelaksanaan Program Kerja Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Padang Pariaman.
- Digdowiseiso, k. (2019). *Teori Pembangunan*. Lembaga Penerbitan Universitas Nasional.
- Febriani, S. H. (202). Analisis Peranan Pemerintah Daerah terhadap Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang. *Jurnal Ilmiah Administrasi (JIA)*, 1-9.
- Ilham, N. S. (2016). Efektivitas Kebijakan Harga Pangan terhadap Ketahanan Pangan. *Jurnal Agro Ekonomi*, 157.
- Kepemimpinan, P. P. (2019). Pengaruh Kepemimpinan Terhadap Partisipasi Masyarakat Pada Perencanaan Pembangunan. 144–164.
- Kharis, M. K. (2014). Pengaruh Dzikir Ikil terhadap kesadaran diri masyarakat nelayan Jama'ah Al-Khidmah Desa Morodemak Kecamatan Bonang Kabupaten Demak.
- Mustanir, A. (2019). Pemberdayaan Masyarakat Kewirausahaan Entrepreneurship Community Empowerment. *Jurnal, February*, 1–14.
- Razak, M. R. (2018). Pengaruh Motivasi dan Budaya Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Di Kantor Sekertariat Daerah Kabupaten Enrekang.
- Sahar, R. D. (2021). Strategi Pemerintah terhadap Pemberdayaan Perempuan Berbasis Wirausaha Desa Cipotakari. *PRAJA*, 178-183.